

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409217/2020**

Revisi ke 01
Tanggal : 02 Juli 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (18) | SULAWESI TENGAH |
| 4. Kode>Nama Satker | : (409217) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU |
| Sebesar | : Rp. | 1.640.151.000 (SATU MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH JUTA SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	1.640.151.000
Rp.	1.640.151.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.640.151.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN P A L U | (051) Rp. | 1.640.151.000 |
|-----------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8004-2490-0902-3541

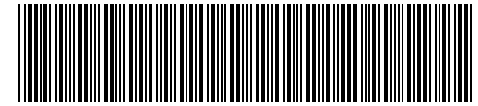
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Kuasa Pengguna Anggaran : LILIK SUJANDI, Bc.IP., S.I.P., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD IDHAM SUTOPO
Pejabat Penanda Tangan SPM : BURHAZIR ZAMDA R., S.H.

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			1.640.151.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			1.640.151.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional			1.640.151.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			
Indikator Kinerja Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional			
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12	Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20	RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25	Anggota	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	Desa/Kelompok/Sekolah	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500	Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1	Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			1.640.151.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin			
	03	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			
	05	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			
	06	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:8004-2490-0902-3541

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Kuasa Pengguna Anggaran : LILIK SUJANDI, Bc.IP., S.I.P., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD IDHAM SUTOPO
Pejabat Penanda Tangan SPM : BURHAZIR ZAMDA R., S.H.

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	132 Orang		1.056.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5.699,00	Orang	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	18 Kegiatan		192.060.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	758,00	Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1 Kantor Wilayah		62.597.000
Indikator Output Kegiatan	03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		145.000.000
Indikator Output Kegiatan	04	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah		92.247.000
Indikator Output Kegiatan	05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah		92.247.000
Indikator Output Kegiatan	06	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33	Kantor Wilayah	

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020

I B. SUMBER DANA



DS:8004-2490-0902-3541

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	1.640.151.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.640.151.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



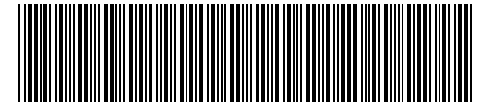
DS:8004-2490-0902-3541

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409217	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	-	1.640.151	-	-	-	1.640.151		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	1.640.151	-	-	-	1.640.151		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.640.151	-	-	-	1.640.151		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi [PN]	-	1.056.000	-	-	-	1.056.000	18.51	
01	RM	-	1.056.000	-	-	-	1.056.000	051	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi [PN]	-	192.060	-	-	-	192.060	18.51	
01	RM	-	192.060	-	-	-	192.060	051	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	62.597	-	-	-	62.597	18.51	
01	RM	-	62.597	-	-	-	62.597	051	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	145.000	-	-	-	145.000	18.51	
01	RM	-	145.000	-	-	-	145.000	051	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	92.247	-	-	-	92.247	18.51	
01	RM	-	92.247	-	-	-	92.247	051	
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	92.247	-	-	-	92.247	18.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8004-2490-0902-3541

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	92.247	-	-	-	92.247	051	
JUMLAH		-	1.640.151	-	-	-	1.640.151		

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8004-2490-0902-3541

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409217) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409217	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	96.751	0	308.987	0	108.282	127.910	171.176	241.941	304.978	280.125	1.640.151
		52 BELANJA BARANG	0	0	96.751	0	308.987	0	108.282	127.910	171.176	241.941	304.978	280.125	1.640.151
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	0	96.751	0	308.987	0	108.282	127.910	171.176	241.941	304.978	280.125	1.640.151
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	96.751	0	308.987	0	108.282	127.910	171.176	241.941	304.978	280.125	1.640.151

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020
IV A. B L O K I R**



DS:8004-2490-0902-3541

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409217] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

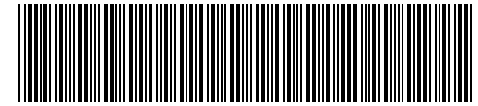
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409217/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:8004-2490-0902-3541

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409217] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003